



## **Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Studi Kasus di SMK Puspa Bangsa Cluring**

**Agus Wijaksono<sup>1</sup> & Slamet<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Dr. H. Sumarno Banyuwangi, Indonesia

Email: aguswijaksono88@gmail.com<sup>1</sup>, slamet.spsi17@gmail.com<sup>2</sup>

### **RIWAYAT ARTIKEL**

Received : 2026-01-03

Revised : 2026-01-17

Accepted : 2026-01-19

### **KEYWORDS**

School-Based Management, Educational Quality, School Management

### **KATA KUNCI**

Manajemen Berbasis Sekolah, Mutu Pendidikan, Pengelolaan Sekolah

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of School-Based Management (SBM) and its contribution to improving educational quality at SMK Puspa Bangsa Cluring Banyuwangi. School-Based Management is viewed as a strategic approach that grants schools autonomy to manage educational resources independently in a participatory, transparent, and accountable manner. This study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving the principal, teachers, educational staff, and the school committee. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing, with data validity ensured through source and technique triangulation. The findings indicate that the implementation of SBM at SMK Puspa Bangsa Cluring Banyuwangi has been carried out fairly well and has made a positive contribution to improving educational quality, particularly in terms of school governance, the quality of educational services, and the relevance of learning programs to students' needs and the world of work. The application of the principles of participation, transparency, and accountability has increased public trust in the school. However, several challenges remain, including uneven understanding of the SBM concept among school members and limited supporting resources. Therefore, strengthening human resource capacity and the leadership of the school principal is necessary to optimize the sustainable implementation of SBM.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMK Puspa Bangsa Cluring Banyuwangi. Manajemen Berbasis Sekolah dipandang sebagai pendekatan strategis yang memberikan otonomi kepada sekolah dalam mengelola sumber daya pendidikan secara mandiri, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta komite sekolah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBS di SMK Puspa Bangsa Cluring Banyuwangi telah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam aspek tata kelola sekolah, kualitas layanan pendidikan, dan relevansi program

pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik serta dunia kerja. Penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti belum meratanya pemahaman warga sekolah terhadap konsep MBS dan keterbatasan sumber daya pendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kepemimpinan kepala sekolah guna mengoptimalkan implementasi MBS secara berkelanjutan.

## 1. Pendahuluan

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk masyarakat, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mutu sekolah. Keterlibatan ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lingkungan dan peserta didik (Mustaqim, 2016). Lebih lanjut, UU 20 Tahun 2003 juga menjadi landasan hukum utama bagi kebijakan pendidikan nasional, khususnya dalam pengembangan kualitas dan relevansi pendidikan melalui pengelolaan sistem pendidikan yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan (Aslan & Abbas, 2025). Proses pendidikan harus selaras dengan pembangunan yang dekat, yang bertujuan untuk mendorong tercapainya tujuan Pendidikan (Slamet, Fitria & Irawan, 2024). Pencapaian tujuan pendidikan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan proses pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengelolaan dan manajemen sekolah secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan menuntut adanya pengelolaan sekolah yang efektif, partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata peserta didik, sehingga seluruh potensi sumber daya pendidikan dapat dioptimalkan secara maksimal.

Salah satu pendekatan manajemen yang dianggap strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan model manajemen pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah dalam merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, serta mengevaluasi sumber daya pendidikan secara mandiri guna mendukung peningkatan mutu pendidikan. Pendekatan ini menekankan prinsip-prinsip utama, seperti kemandirian, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah (Mewengkang *et al.*, 2025). Lebih lanjut, penerapan MBS mendorong keterlibatan seluruh pemangku

kepentingan sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan tersebut memungkinkan sekolah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mampu merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan konteks dan karakteristik lingkungan sekolah (Narendas, Suyatno, & Widodo, 2024).

Selain itu, MBS juga menuntut agar seluruh pengelolaan sumber daya dan proses pendidikan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan pendidikan, sehingga tercipta tata kelola sekolah yang profesional dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan (Raissa *et al.*, 2024). Secara teoritis, penerapan MBS diyakini mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan karena keputusan-keputusan strategis diambil langsung oleh pihak yang paling memahami kondisi sekolah. Selain itu, MBS juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat, dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program sekolah. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pusat pengambilan keputusan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi dkk. menunjukkan bahwa penerapan MBS mampu meningkatkan mutu akademik dan non-akademik peserta didik melalui pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan partisipasi aktif warga sekolah (Ukhra & Fajariyani, 2025). Penelitian lain oleh Rahman menemukan bahwa implementasi MBS dan partisipasi komite sekolah berpengaruh signifikan terhadap mutu pembelajaran, terutama dalam peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi pembelajaran (Usa, Baharuddin & Syamsuddin, 2024). Selain itu, hasil penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Hidayat menegaskan bahwa MBS dapat meningkatkan transparansi

pengelolaan sekolah, memperkuat budaya kerja kolaboratif, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan stakeholder (Rahayu *et al.*, 2025).

Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa keberhasilan MBS sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah dan kemampuan manajerial dalam mengelola perubahan organisasi sekolah (Sihombing, & Samosir, 2021). Sementara menurut penelitian Gunadi dan Amalia (2025) upaya yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah untuk mewujudkan manajemen sekolah yang berprestasi Kesimpulan yang diambil yaitu untuk dapat mewujudkan sekolah yang berprestasi tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah tetapi juga merupakan tanggung jawab dari tenaga kependidikan, siswa, masyarakat dan pemerintah.

Dalam konteks pendidikan menengah kejuruan, penerapan Manajemen Berbasis Sekolah memiliki urgensi yang lebih besar karena SMK dituntut untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi dunia kerja. SMK Puspa Bangsa Cluring Banyuwangi sebagai salah satu lembaga pendidikan kejuruan memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan observasi awal, implementasi MBS di SMK Puspa Bangsa Cluring masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain belum optimalnya perencanaan program berbasis kebutuhan sekolah, keterlibatan stakeholder yang belum maksimal, serta pelaksanaan evaluasi mutu yang belum terstruktur secara sistematis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Puspa Bangsa Cluring Banyuwangi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai pelaksanaan MBS di sekolah tersebut, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan rekomendasi strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam konteks nyata, khususnya bagaimana kebijakan, praktik manajerial, serta keterlibatan

pemangku kepentingan sekolah berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Studi kasus digunakan untuk menggali secara komprehensif dan kontekstual praktik MBS yang diterapkan di SMK Puspa Bangsa Cluring Banyuwangi sebagai satuan pendidikan yang memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri (Yin, 2018). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah, serta melalui observasi terhadap proses pengelolaan sekolah dan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi, seperti dokumen perencanaan sekolah, program kerja, laporan evaluasi, dan arsip kebijakan sekolah yang relevan dengan implementasi MBS. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

## 3. Hasil

### Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pengelolaan Sekolah

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Puspa Bangsa Cluring Banyuwangi tercermin dari adanya pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam mengelola sumber daya pendidikan secara mandiri. Otonomi tersebut mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi program sekolah. Sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun visi, misi, tujuan, serta program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa yang menyatakan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan strategi pengelolaan pendidikan yang memberikan kemandirian kepada sekolah agar mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien guna meningkatkan mutu pendidikan (Mulyasa, 2019).

Lebih lanjut, penerapan MBS di SMK Puspa Bangsa Cluring Banyuwangi tampak pada proses perencanaan program sekolah yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan. Keterlibatan berbagai unsur sekolah tersebut mencerminkan prinsip partisipasi yang menjadi karakter utama MBS.

Menurut Sagala, perencanaan pendidikan yang bersifat partisipatif akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program sekolah, sehingga mendorong komitmen yang lebih kuat dalam pelaksanaannya (Sagala, 2018). Dengan adanya partisipasi aktif, kebijakan dan program sekolah tidak bersifat *top-down*, melainkan lahir dari kebutuhan riil warga sekolah.

Dalam aspek pengorganisasian, implementasi MBS diwujudkan melalui pembentukan struktur organisasi sekolah yang jelas dan pembagian tugas yang proporsional sesuai dengan kompetensi masing-masing personel. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin dan manajer pendidikan yang mengoordinasikan seluruh kegiatan sekolah, sedangkan guru dan tenaga kependidikan menjalankan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. Menurut Terry, pengorganisasian merupakan proses penentuan dan pengelompokan kegiatan serta pembagian wewenang dan tanggung jawab agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif (dalam Syahputra & Aslami, 2023). Dengan pengorganisasian yang baik, setiap unsur sekolah dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian mutu pendidikan.

Selain itu, pelaksanaan program sekolah dalam kerangka MBS menuntut adanya pemanfaatan sumber daya secara optimal, transparan, dan akuntabel. Program yang telah direncanakan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi nyata sekolah, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi sumber daya manusia. Robbins dan Coulter (2018) menegaskan bahwa pelaksanaan manajemen yang efektif harus didukung oleh kesesuaian antara perencanaan dan implementasi, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan berkelanjutan. Dalam konteks MBS, keselarasan tersebut menjadi kunci agar program sekolah benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran.

Tahap evaluasi juga menjadi bagian penting dalam implementasi MBS di SMK Puspa Bangsa Cluring Banyuwangi. Evaluasi dilakukan untuk menilai ketercapaian program serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan sekolah. Menurut Stufflebeam dan Coryn (2014), evaluasi program pendidikan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan, sehingga lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan hasil pendidikan secara sistematis. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, sekolah dapat

melakukan penyesuaian strategi manajemen sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

Secara keseluruhan, implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam pengelolaan SMK Puspa Bangsa Cluring Banyuwangi telah mencerminkan prinsip-prinsip utama MBS, yaitu kemandirian, partisipasi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memungkinkan sekolah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekitar. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Mulyasa (2019), keberhasilan MBS sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan manajemen secara profesional dan berorientasi pada mutu pendidikan.

### **Kontribusi Manajemen Berbasis Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan**

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Puspa Bangsa Cluring Banyuwangi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan, efektivitas pengelolaan sekolah, serta relevansi program pendidikan dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekitar. Melalui MBS, sekolah memperoleh keleluasaan dalam merumuskan kebijakan internal dan menyusun program pengembangan sekolah yang berorientasi pada mutu. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa (2019) yang menyatakan bahwa MBS merupakan pendekatan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberdayaan sekolah agar mampu mengelola sumber daya secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Salah satu kontribusi penting MBS terlihat pada meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan, khususnya komite sekolah dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan tersebut memungkinkan sekolah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal serta tuntutan dunia kerja, terutama sebagai sekolah menengah kejuruan yang menyiapkan lulusan siap kerja. Partisipasi aktif stakeholder dalam implementasi MBS dapat menciptakan sinergi antara sekolah dan lingkungan, sehingga kebijakan dan program pendidikan yang dirumuskan menjadi lebih kontekstual, adaptif, dan tepat sasaran (Pujiastuti, 2021). Dengan demikian, sekolah tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada relevansi kompetensi lulusan.

Selain meningkatkan relevansi program pendidikan, MBS juga berkontribusi pada penguatan

tata kelola sekolah yang baik (*good school governance*). Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan sekolah mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Setiap penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan pencapaian kinerja sekolah disampaikan secara terbuka kepada warga sekolah dan masyarakat. Raissa dkk. menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang efektif dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Raissa *et al.*, 2024). Kepercayaan publik yang meningkat akan berdampak positif pada dukungan moral maupun material terhadap sekolah.

Kontribusi MBS juga tampak pada meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Dengan adanya pelibatan guru dalam perencanaan dan evaluasi program sekolah, guru terdorong untuk lebih bertanggung jawab terhadap mutu pembelajaran. Sagala menegaskan bahwa pelibatan guru dalam manajemen sekolah akan meningkatkan motivasi kerja, komitmen profesional, serta kualitas proses pembelajaran di kelas (Sagala, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa MBS tidak hanya berfokus pada aspek struktural manajemen, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas proses pendidikan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi MBS di SMK Puspa Bangsa Cluring Banyuwangi masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain belum meratanya pemahaman warga sekolah mengenai konsep dan prinsip MBS, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kesiapan aktor pelaksana dan konteks organisasi tempat kebijakan tersebut diterapkan (Yin, 2018). Oleh karena itu, tanpa pemahaman yang komprehensif dan dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan MBS berpotensi belum berjalan secara optimal.

Dalam konteks tersebut, peran kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor kunci keberhasilan MBS. Kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi manajerial, kepemimpinan visioner, serta kemampuan membangun komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Mulyasa menegaskan bahwa kepala sekolah dalam sistem MBS berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang menentukan arah kebijakan dan budaya mutu sekolah (Mulyasa, 2019). Kepemimpinan yang kuat dan profesional akan

mampu menggerakkan seluruh warga sekolah untuk berkomitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMK Puspa Bangsa Cluring Banyuwangi, baik dari aspek tata kelola sekolah, kualitas layanan pendidikan, maupun relevansi program pembelajaran. Meskipun masih terdapat kendala dalam implementasinya, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan pemahaman konsep MBS, serta optimalisasi kepemimpinan kepala sekolah menjadi strategi penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan MBS dalam meningkatkan mutu pendidikan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Puspa Bangsa Cluring Banyuwangi telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Penerapan prinsip-prinsip MBS, seperti kemandirian, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, memungkinkan sekolah mengelola sumber daya pendidikan secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik serta lingkungan sekitar. Implementasi MBS mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan masyarakat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Keterlibatan tersebut berdampak pada meningkatnya relevansi program sekolah, kualitas layanan pendidikan, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah tantangan, seperti belum meratanya pemahaman warga sekolah terhadap konsep MBS dan keterbatasan sumber daya pendukung. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi MBS perlu didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip MBS, serta kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan profesional. Dengan dukungan tersebut, Manajemen Berbasis Sekolah diharapkan dapat terus dioptimalkan sebagai strategi efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

## 5. Referensi

- Aslan, A., & Abbas, A. (2025). Analysis of the principles and legal provisions of Law No. 20 of 2003 on the national education system as the foundation for national education policy. *International Journal of Teaching and Learning (INJOTEL)*, 2(12), 1698–1711.
- Gunadi, G., & Amalia, N. (2025). Manajemen kesiswaan SD Amaliah Bogor. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, 5(6). <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i6.2202>
- Mewengkang, C. G., Mulalinda, R., Tamasintang, F., & Caroles, N. (2024). Principles of school-based educational management at SMK Negeri 6 Manado. *International Journal of Education, Information Technology, and Others*, 7(1), 358–364.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyasa, E. (2019). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustaqim, M. (2016). Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. *AL-MABSUT: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(1), 1–31. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v10i1.118>
- Narendas, O. M., Suyatno, S., & Widodo, H. (2024). Implementasi manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan otonomi sekolah di SMP. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(6), 6694–6707. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i6.7756>
- Pujiastuti, E. (2021). Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 700–711. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2022>
- Rahayu, R., Gusti, R. A., Putri, R. A., Gusnita, S., & Irfani, D. (2025). Manajemen berbasis sekolah dan implikasinya terhadap mutu pendidikan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6), 1–16. <https://doi.org/10.62281/v3i6.2130>
- Raissa, H., Syahla, I., Lubi, R. N., & Hesti, K. (2024). Manajemen berbasis sekolah meningkatkan otonomi dan akuntabilitas. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, 4(1), 129–137. <https://doi.org/10.58192/insdun.v4i1.2861>
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th global ed.). New York, NY: Pearson Education.
- Sagala, S. (2018). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sihombing, D., & Samosir, H. (2021). Optimalisasi peran manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(4), 612–622. <https://doi.org/10.29210/020211263>
- Slamet, S., Fitria, M., & Irawan, V. W. E. (2024). Peran guru PAI dalam membentuk karakter peserta didik di SMK NU Darussalam Kecamatan Srono. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(3), 298–305. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.495>
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. (2014). *Evaluation theory, models, and applications*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-prinsip utama manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 51–61. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1615>
- Ukhra, R., & Fajariani, K. (2025). Implementation of school-based management (SBM) in improving the quality of education in elementary schools. *Journal Informatic, Education and Management (JIEM)*, 7(2), 78–85. <https://doi.org/10.61992/jiem.v7i2.121>
- Usa, A., Baharuddin, B., & Syamsuddin, B. (2024). The influence of school-based management implementation and school committee participation on the improvement of learning quality. *Nazzama Journal of Management Education*, 3(2), 136–149. <https://doi.org/10.24252/jme.v3i2.42141>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).